



Persepsi Masyarakat Terhadap Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kota Dumai

Nesa Ananda Putri¹, Lidia Pasaribu², Ilhamdi³, Dila Erlianti⁴

^{1,2,3,4}STIA Lancang Kuning Dumai

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Dumai. Fenomena KDRT masih dianggap sebagai masalah pribadi oleh sebagian masyarakat, yang menyebabkan rendahnya angka pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga Kota Dumai dengan berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, dan status pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa KDRT tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga verbal, psikologis, dan ekonomi. Faktor utama pemicu KDRT adalah tekanan ekonomi, budaya patriarki, kurangnya komunikasi, dan pengaruh lingkungan. Masyarakat cenderung pasif dalam menanggapi KDRT karena adanya anggapan bahwa hal tersebut merupakan urusan pribadi. Namun, sebagian informan menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan untuk membantu korban. Dampak yang dialami korban mencakup trauma, kehilangan kepercayaan diri, isolasi sosial, hingga ketergantungan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat, serta akses yang lebih luas terhadap layanan perlindungan korban.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Persepsi Masyarakat; Budaya Patriarki.

ABSTRACT: This study aims to understand public perceptions of domestic violence (KDRT) in Dumai City. Domestic violence is still considered a private matter by some communities, resulting in low reporting rates. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants consist of Dumai residents from various age groups, genders, and marital statuses. The results reveal that the community increasingly recognizes domestic violence not only as physical abuse but also includes verbal, psychological, and economic violence. The main triggering factors of domestic violence are economic pressure, patriarchal culture, poor communication, and environmental influence. The public tends to respond passively due to the belief that domestic issues should remain private. However, some informants demonstrated awareness and willingness to help victims. The impacts experienced by victims include trauma, loss of self-confidence, social isolation, and economic dependence. This study recommends enhancing community education, involving community and religious leaders, and improving access to protection services for victims.

Keywords: Domestic Violence; Public Perception; Patriarchal Culture.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah isu baru dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia, namun kasus-kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun berbagai kebijakan telah diberlakukan, termasuk pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kenyataannya banyak kasus yang tidak terlaporkan. Korban, yang sebagian besar adalah perempuan, kerap kali memilih diam karena takut stigma sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar maupun institusi hukum. Di balik dinding rumah yang tertutup, kekerasan sering kali tersembunyi dan dianggap sebagai urusan privat yang tidak pantas dicampuri oleh orang luar (Santoso, 2019).

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, tercatat 200 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2021, yang mayoritas merupakan kasus KDRT. Dari jumlah tersebut, 80% berhasil ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sementara sisanya masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Namun angka tersebut diyakini belum merepresentasikan kondisi yang sebenarnya di lapangan karena banyak korban yang memilih untuk tidak melapor (Dumai, 2022).

Kondisi ini diperburuk oleh persepsi masyarakat yang masih melihat KDRT sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang wajar atau bahkan sebagai hak suami untuk mendidik istri dan anak. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat, ketergantungan ekonomi perempuan, serta pemahaman yang minim tentang bentuk-bentuk KDRT selain fisik (seperti kekerasan verbal, psikis, dan ekonomi) menjadi faktor penguatan sikap permisif terhadap kekerasan domestik. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menyalahkan korban daripada pelaku, bahkan menganggap laporan kekerasan sebagai aib yang dapat mempermalukan keluarga (Azizah & Kurnia, 2022).

Seperti yang dijelaskan oleh Sylvia Walby, patriarki merupakan sistem sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan melalui struktur sosial seperti rumah tangga, pekerjaan berbayar, negara, kekerasan, seksualitas, serta institusi budaya—sehingga dominasi gender tidak hanya terjadi secara individual, melainkan sistematis dan institusional. Dengan demikian, fenomena KDRT tidak bisa dipisahkan dari relasi kuasa yang timpang dan norma budaya diskriminatif yang telah tertanam dalam struktur sosial (Sylvia, 1990).

Teori patriarki ini memperjelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan keluarga atau individu, tetapi juga cerminan relasi kuasa dan norma patriarkal yang membungkai kekerasan sebagai urusan privat. Dalam konteks Kota Dumai, teori ini memberikan dasar kritis untuk melihat bagaimana budaya patriarki—dengan dominasi sosial dan ketergantungan ekonomi perempuan—membentuk persepsi masyarakat yang permisif terhadap KDRT.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap KDRT sebagai isu sosial dan hukum telah disoroti dalam beberapa penelitian (2022). Penelitian lain lebih banyak menyoroti aspek legal atau psikologis korban, namun belum banyak yang secara khusus menggali bagaimana pola pikir dan persepsi masyarakat terhadap KDRT, terutama dalam konteks lokal seperti Kota Dumai. Padahal, persepsi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Temuan lainnya (2022) menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Petir, Kota Tangerang, masih menganggap KDRT sebagai masalah privat sehingga enggan melaporkannya meski sudah ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Di sisi lain, (2024) dalam kajian mereka di Desa Betung 1 (Kabupaten Ogan Ilir) mengungkap betapa kuatnya budaya patriarki yang memelihara ketidaksetaraan gender dan mendukung normalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, (2021) menyatakan bahwa budaya patriarki yang telah mendarah daging dalam masyarakat dan birokrasi serta struktur hukum di Indonesia, menyebabkan undang-undang KDRT menjadi kurang efektif dalam praktiknya.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap KDRT dalam konteks lokal seperti di Kota Dumai—dengan latar budaya, sosial, dan ekonomi yang unik. Padahal, pemahaman masyarakat terhadap KDRT sangat memengaruhi keberhasilan intervensi sosial, seperti edukasi, pelaporan, dukungan terhadap korban, bahkan keberlanjutan penanganan kasus.

Persepsi masyarakat terhadap KDRT merupakan cerminan dari konstruksi sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat memaknai tindakan kekerasan, siapa yang dianggap sebagai korban atau pelaku yang “layak,” serta sejauh mana mereka merasa bertanggung jawab untuk ikut campur, menjadi aspek penting dalam memahami dan merancang strategi pencegahan yang efektif. Di sisi lain, pemahaman yang salah terhadap KDRT dapat memperkuat normalisasi kekerasan dan mempersulit korban untuk mencari perlindungan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggali bagaimana masyarakat Dumai memaknai KDRT, bagaimana budaya patriarki lokal membentuk persepsi mereka, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka, dan bagaimana persepsi ini membentuk sikap dan tindakan terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggali pengalaman, opini, serta pandangan masyarakat secara langsung melalui wawancara mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi berbasis konteks lokal yang dapat digunakan dalam program edukasi dan perlindungan korban KDRT.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kota Dumai, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan strategi peningkatan kesadaran dan pencegahan KDRT yang lebih responsif terhadap kondisi sosial budaya setempat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana masyarakat Kota Dumai memaknai dan merespons kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam konteks sosial, budaya, dan personal mereka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa persepsi masyarakat secara langsung, termasuk emosi, sikap, dan pengalaman pribadi yang tidak dapat terungkap melalui survei kuantitatif (Creswell, 2016). Studi kasus digunakan karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak selalu jelas (Yin, 2018).

Lokasi penelitian berfokus pada beberapa wilayah pemukiman masyarakat di Kota Dumai, seperti Jalan Nusantara (Dumai Kota), Jalan Jaya Mukti (Dumai Timur), dan Jalan Ombak (Dumai Selatan). Lokasi-lokasi ini dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan keberagaman latar belakang sosial ekonomi warga serta kemudahan akses dalam melakukan wawancara (Sugiyono, 2018).

Subjek penelitian terdiri dari tujuh informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Para informan adalah warga Dumai yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan yang relevan terhadap isu KDRT. Informan terdiri dari lima perempuan dan dua laki-laki, dengan rentang usia antara 17 hingga 49 tahun, serta latar belakang status pernikahan

yang bervariasi (menikah, belum menikah, dan bercerai). Pemilihan informan mempertimbangkan keberagaman perspektif agar hasil yang diperoleh merepresentasikan kondisi sosial masyarakat Dumai secara lebih komprehensif (Patton, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: **wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi**. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti mengeksplorasi lebih jauh jawaban yang diberikan oleh informan (Kvale & Brinkmann, 2009). Observasi digunakan untuk mencermati situasi sosial dan interaksi di lingkungan tempat tinggal informan, terutama terkait dengan respon masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan domestik. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto, berita lokal, dan data statistik dari lembaga terkait.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan **teknik analisis data kualitatif** menurut **Miles dan Huberman**, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi penting dari wawancara dan dokumentasi yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan kutipan langsung dari informan untuk memberikan gambaran yang autentik. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dengan mengaitkan temuan-temuan lapangan dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya, terutama teori persepsi dan teori kekerasan dalam rumah tangga (Miles et al., 2014).

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik **triangulasi sumber dan metode** (Denzin, 2012). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* dengan mengonfirmasi ulang beberapa informasi kepada informan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh (Lincoln & Guba, 1985).

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menggali pemahaman masyarakat secara utuh mengenai KDRT, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun tindakan mereka dalam merespons kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan strategi pencegahan dan intervensi berbasis masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang kerap kali tersembunyi di balik norma dan kebiasaan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi, bukan persoalan publik. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terlaporkan dan cenderung diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak.

Persepsi masyarakat terhadap KDRT sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang apa yang dianggap sebagai kekerasan. Hasil wawancara dengan informan di Kota Dumai menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengasosiasikan KDRT hanya pada kekerasan fisik seperti pemukulan, penamparan, atau penendangan. Namun, seiring dengan semakin terbukanya akses informasi dan peningkatan kesadaran gender, terdapat pemahaman baru bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga meliputi kekerasan verbal, psikologis, dan ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan dalam penelitian ini:

"Dulu saya kira KDRT itu cuma kalau suami mukul istri. Tapi sekarang saya tahu, kalau sering direndahkan, dilarang kerja, atau dikasih uang cuma sedikit padahal kebutuhan rumah tangga besar, itu juga termasuk kekerasan."
(Wawancara, A, 10 April 2025)

Pernyataan tersebut menguatkan argumen pada penelitian (2022) bahwa pemahaman masyarakat tentang KDRT perlahan mulai bergeser, meskipun belum sepenuhnya menyeluruh. Namun, pemahaman yang lebih luas ini belum tentu sejalan dengan keberanian untuk bertindak. Banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum, tetapi tetap memilih diam karena takut konflik, malu terhadap tetangga, atau tidak tahu harus melapor ke mana.

Dalam ranah sosial, persepsi bahwa KDRT adalah "masalah rumah tangga" yang tidak pantas dibicarakan di ruang publik masih kuat mengakar. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan turut memperkuat pandangan bahwa istri atau anak harus tunduk dan tidak boleh membantah.

Sikap ini pada akhirnya melegitimasi tindakan kekerasan sebagai bentuk "mendidik" atau "mengatur rumah tangga".

Menurut temuan (2022), pemahaman yang keliru mengenai relasi kuasa dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap KDRT sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selain itu, kurangnya edukasi dan akses terhadap informasi hukum membuat banyak masyarakat tidak mengetahui hak-hak korban maupun mekanisme perlindungan yang tersedia.

Lebih lanjut, hasil dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki sikap yang beragam terhadap korban KDRT. Sebagian besar cenderung menyalahkan korban dengan anggapan bahwa korban "kurang patuh", "tidak pandai menjaga rumah tangga", atau bahkan "membuka aib sendiri". Stigma ini menjadi hambatan serius dalam upaya pemberdayaan korban dan pelaporan kasus.

Dalam konteks Kota Dumai, persepsi masyarakat terhadap KDRT masih didominasi oleh narasi moral dan budaya. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka enggan membantu korban karena takut dianggap ikut campur atau merusak keharmonisan rumah tangga orang lain. Namun, terdapat juga informan yang menyadari pentingnya solidaritas sosial dalam membantu korban keluar dari siklus kekerasan. Berikut adalah ringkasan bentuk persepsi yang ditemukan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Persepsi Masyarakat Kota Dumai terhadap Bentuk KDRT

No	Bentuk Kekerasan	Frekuensi Disebut oleh Informan	Pemahaman Masyarakat
1	Kekerasan fisik	Tinggi	Sangat dipahami
2	Kekerasan verbal/psikologis	Sedang	Mulai dipahami, belum menyeluruh
3	Kekerasan ekonomi	Rendah	Masih dianggap bukan kekerasan
4	Kekerasan seksual dalam rumah	Sangat rendah	Dianggap tabu untuk dibahas

Data ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman terhadap KDRT mulai berkembang, masih ada kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh kombinasi faktor budaya, ekonomi, dan sistem hukum yang belum ramah terhadap korban. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat

terhadap KDRT tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang membentuknya. Dengan demikian, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas dan menyentuh komunitas secara langsung agar masyarakat tidak hanya memahami KDRT sebagai isu hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan respon kolektif dan keberpihakan pada korban.

B. Persepsi Masyarakat Terkait Penyebab KDRT

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Dumai, persepsi masyarakat mengenai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencerminkan pandangan yang berlapis dan dipengaruhi oleh pengalaman langsung, norma sosial, serta kondisi sosial-ekonomi setempat. Masyarakat cenderung memaknai KDRT sebagai akibat dari pola relasi rumah tangga yang timpang, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta tekanan hidup yang berat. Pandangan ini sejalan dengan temuan (Connell, 2005) mengenai *hegemonic masculinity*, di mana dominasi laki-laki dalam rumah tangga kerap dilegitimasi oleh budaya dan norma sosial yang berlaku.

Salah satu informan mengungkapkan bahwa pandangan sebagian besar masyarakat masih menganggap laki-laki sebagai pemegang kendali mutlak rumah tangga. Hal ini membuat tindakan kekerasan sering dibenarkan dengan alasan “mendidik” pasangan. Sebagaimana disampaikan oleh informan N:

“Laki-laki itu diajarkan sejak kecil untuk jadi pemimpin, kadang mereka salah artikan itu jadi merasa punya kuasa atas istri.” (Wawancara, N, 10 April 2025)

Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya patriarki masih kuat dalam membentuk persepsi masyarakat, sehingga kekerasan dianggap sebagai bentuk pembinaan atau konsekuensi ketidakpatuhan. Studi penelitian (2021) juga menegaskan bahwa superioritas laki-laki dalam budaya patriarki memberi ruang bagi perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan, termasuk dalam konteks rumah tangga. Selain faktor budaya, masyarakat juga menyoroti ketidakstabilan emosi sebagai salah satu penyebab KDRT. Beberapa informan menyebut bahwa pelaku biasanya mudah marah dan membawa masalah dari luar ke dalam rumah. Informan L menjelaskan:

“Kalau dari kecil kurang kasih sayang, bisa tumbuh jadi orang yang nggak sabaran dan gampang marah. Kadang KDRT itu pelampiasan dari luka batin yang nggak pernah sembuh.” (Wawancara, L, 12 April 2025)

Pernyataan ini menggambarkan kesadaran masyarakat bahwa latar belakang masa kecil dan luka emosional yang tidak terselesaikan dapat memicu perilaku kekerasan di kemudian hari. Walker dalam teorinya tentang *cycle of violence* menyatakan bahwa pengalaman kekerasan di masa lalu berkontribusi terhadap perilaku kekerasan di masa dewasa (Lenore E. Walker, 2014).

Tekanan ekonomi juga menjadi isu yang sering disebutkan oleh informan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga dinilai memicu pertengkar yang berujung pada KDRT. Sebagaimana diungkapkan oleh informan A:

“Masalah uang itu sering jadi awal mula pertengkar. Kalau udah stres karena ekonomi, terus ada masalah lain kayak bohong atau selingkuh, itu makin memperparah situasi.” (Wawancara, A, 10 April 2025)

Temuan ini sejalan dengan penelitian (2020) yang menunjukkan bahwa beban finansial yang berat memperbesar risiko konflik rumah tangga, terutama jika diiringi komunikasi yang buruk dan ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat di Kota Dumai mengenai penyebab KDRT tidak terbatas pada kekerasan fisik semata, melainkan mencakup dimensi budaya, emosional, dan ekonomi yang saling berkelindan. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa pemahaman masyarakat terhadap KDRT dipengaruhi oleh kombinasi nilai-nilai tradisional, pengalaman pribadi, dan kondisi sosial-ekonomi, sehingga penanggulangannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara menyeluruh.

C. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap KDRT

Persepsi dan sikap masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan yang masih didominasi oleh pandangan bahwa KDRT merupakan urusan pribadi yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak luar. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar informan cenderung bersikap pasif

ketika mengetahui adanya kasus KDRT di lingkungan mereka, kecuali jika korban secara eksplisit meminta pertolongan.

Sebagaimana diungkapkan oleh dua informan, L dan E, keduanya mengakui bahwa meskipun mengetahui adanya kekerasan di lingkungannya, mereka belum pernah memberikan bantuan kepada korban. Keduanya berpendapat bahwa persoalan KDRT adalah urusan internal rumah tangga yang harus diselesaikan sendiri oleh keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh informan E:

“Saya belum pernah membantu atau melaporkan karena saya pikir itu bukan urusan saya, itu urusan keluarga mereka.” (Wawancara, E, 12 April 2025)

Pandangan ini mencerminkan norma sosial yang membatasi partisipasi masyarakat dalam menangani kekerasan domestik. Sikap pasif ini juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Minimnya pengetahuan hukum, termasuk hak-hak korban serta mekanisme perlindungan yang tersedia, membuat masyarakat enggan mengambil tindakan lebih lanjut.

Selain itu, beberapa informan menyampaikan bahwa pembicaraan mengenai KDRT masih dianggap tabu dan sensitif. Topik ini kerap dikaitkan dengan aib keluarga, sehingga membicarakannya di ruang publik dianggap tidak pantas. Akibatnya, ruang diskusi dan edukasi mengenai KDRT menjadi terbatas, dan budaya bungkam semakin menguat. Norma yang mendorong masyarakat untuk “tidak mencampuri urusan orang lain” pada akhirnya melanggengkan kekerasan, karena pelaku merasa aman dari intervensi eksternal. Hal ini terlihat dari ungkapan informan L:

“Kadang orang takut ngomong karena nanti keluarganya malu. Di sini, masalah rumah tangga itu dianggap rahasia.” (Wawancara, S, 10 April 2025)

Fenomena ini sejalan dengan temuan (2021) yang menyebut bahwa masyarakat urban di Indonesia masih memegang nilai kolektivisme secara selektif—pada isu KDRT, nilai tersebut justru melahirkan sikap abai demi menjaga keharmonisan sosial semu dan menghindari konflik terbuka. Berdasarkan temuan ini, dapat ditegaskan bahwa persepsi masyarakat di Kota Dumai mengenai sikap terhadap KDRT masih didominasi oleh kecenderungan untuk menjaga jarak, dengan sebagian kecil yang siap terlibat aktif. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa sikap masyarakat terhadap KDRT dipengaruhi

oleh norma budaya, rasa takut terhadap konsekuensi sosial, serta adanya dorongan empati yang bersifat situasional.

Namun, tidak semua informan menunjukkan sikap serupa. Dalam penelitian ini, terdapat juga individu yang menyatakan kesediaannya untuk membantu korban KDRT apabila korban menunjukkan tanda-tanda membutuhkan dukungan. Mereka menyarankan agar korban diarahkan kepada layanan pendampingan hukum atau lembaga perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat masih pasif, terdapat sebagian kecil yang mulai menyadari pentingnya peran lingkungan dalam merespons kasus kekerasan.

Sikap proaktif seperti ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang mulai tumbuh, meskipun masih terbatas. Bahkan, salah satu informan laki-laki, O, menolak anggapan bahwa KDRT adalah urusan privat semata, dan menekankan peran masyarakat dalam mencegah kekerasan:

“Kita tidak bisa cuek soal ini, karena berkaitan dengan nyawa seseorang. Jika sudah berbahaya, kita harus ikut campur dan membantu.” (Wawancara, O, 10 April 2025)

Pernyataan ini merepresentasikan adanya potensi perubahan sikap sosial menuju keterlibatan yang lebih aktif dan responsif. Penelitian (2021) menegaskan bahwa keberpihakan lingkungan sekitar berperan penting dalam pemulihan psikologis korban dan keberhasilan pelaporan kasus.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap KDRT masih terbatas pada pandangan tradisional yang menganggapnya sebagai masalah internal keluarga, sehingga berdampak pada sikap pasif dalam merespons. Meskipun terdapat indikasi awal perubahan menuju keterlibatan aktif, sikap ini belum menjadi norma dominan. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa persepsi dan sikap masyarakat terhadap KDRT di Kota Dumai masih dipengaruhi oleh norma budaya, rasa takut terhadap konsekuensi sosial, dan pemahaman hukum yang rendah, sehingga diperlukan upaya edukasi dan perubahan budaya untuk membangun solidaritas sosial yang berpihak pada korban.

D. Persepsi Masyarakat terhadap Dampak KDRT

Masyarakat Kota Dumai memandang bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terlihat dari luka fisik, tetapi juga dapat meninggalkan bekas yang

lebih dalam pada aspek psikologis, sosial, dan kehidupan keluarga secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyadari bahwa penderitaan korban sering kali berlangsung lama, bahkan setelah kekerasan berhenti.

Beberapa informan menyoroti bahwa tekanan emosional akibat KDRT dapat menghancurkan kepercayaan diri dan kesehatan mental korban. Seorang informan, T, menuturkan pengalamannya menghadapi beban hidup setelah ditinggalkan pasangan:

“Saya pernah merasa sangat tertekan, ditinggal gitu aja sama suami, tapi tetap harus kuat buat anak. Kadang malam suka nangis sendiri, bingung besok makan apa, anak-anak sekolah gimana.” (Wawancara, T, 10 April 2025)

Hal senada diungkapkan oleh D, yang menekankan bahwa kekerasan verbal memiliki dampak yang sama beratnya dengan kekerasan fisik:

“Orang mikir KDRT itu cuma soal dipukul, padahal perkataan kasar tiap hari juga bikin mental hancur. Lama-lama jadi percaya diri hilang, takut ngomong, takut bertindak.” (Wawancara, D, 10 April 2025)

Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan (2022) yang menyebutkan bahwa korban KDRT kerap mengalami depresi, insomnia, dan gangguan kecemasan. Campbell menegaskan bahwa trauma psikologis akibat kekerasan berulang dapat menghambat fungsi sosial korban, mengisolasi mereka dari lingkungan, dan mengurangi kemampuan membangun hubungan yang sehat (Campbell, 2016). Temuan lain (2021) juga mengingatkan bahwa tanpa intervensi psikososial yang tepat, korban berisiko terus terjebak dalam siklus kekerasan yang sama.

Selain luka psikologis, masyarakat juga melihat adanya tekanan sosial yang memperburuk penderitaan korban. Stigma dan budaya bungkam menjadi hambatan besar dalam proses pemulihan. Beberapa informan menyebutkan bahwa korban sering kali dianggap membawa aib keluarga, sehingga dilarang mencari bantuan. Narasumber N, yang masih berusia 17 tahun, menceritakan pengalamannya ketika menyaksikan tetangganya menjadi korban:

“Saya pernah dengar suara ribut, tapi keluarganya sendiri bilang jangan dibesar-besarkan, katanya itu urusan rumah tangga.” (Wawancara, N, 10 April 2025)

Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran sosial terhadap hak korban dan kekuatnya norma yang melanggengkan budaya diam. Temuan (2022) menemukan bahwa tekanan sosial dan nilai konservatif membuat banyak korban memilih bungkam, sehingga kekerasan terus berulang tanpa ada intervensi.

Lebih jauh lagi, persepsi masyarakat juga mencakup pandangan bahwa KDRT dapat meninggalkan dampak lintas generasi. Beberapa informan menyebut bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan cenderung menjadi pribadi yang takut, tertutup, atau bahkan menganggap kekerasan sebagai hal normal dalam rumah tangga. Penelitian (2023) menunjukkan bahwa paparan KDRT pada masa kanak-kanak meningkatkan risiko perilaku agresif di masa dewasa, serta kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dampak KDRT sudah melampaui pandangan yang hanya terbatas pada luka fisik. Masyarakat menyadari adanya konsekuensi psikologis, tekanan sosial, dan pengaruh terhadap anak sebagai dampak jangka panjang. Namun, meskipun kesadaran ini ada, budaya bungkam dan stigma masih menjadi penghalang utama bagi korban untuk pulih dan mendapatkan dukungan. Kesadaran kolektif yang lebih kuat, intervensi komunitas, dan pemahaman hukum menjadi kunci untuk memutus siklus kekerasan lintas generasi di Kota Dumai.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kota Dumai terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih cenderung terbatas pada kekerasan fisik, sementara bentuk kekerasan lain seperti psikologis, seksual, dan penelantaran belum sepenuhnya dipahami. Pandangan ini dipengaruhi oleh norma budaya patriarki dan anggapan bahwa KDRT adalah urusan privat, sehingga memengaruhi sikap masyarakat yang cenderung pasif dan enggan terlibat, meskipun mengetahui adanya kasus di sekitarnya.

Pemahaman yang parsial tersebut berdampak pada minimnya dukungan bagi korban, serta memperkuat budaya bungkam yang menghambat pelaporan. Dampak KDRT dipersepsikan terutama pada kerugian fisik, padahal korban juga mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan diri, dan isolasi sosial. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan juga berpotensi meniru pola perilaku tersebut di masa depan.

Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum, edukasi publik, dan penguatan dukungan berbasis komunitas sangat penting untuk mengubah persepsi masyarakat menjadi lebih komprehensif dan proaktif. Perubahan budaya yang menghapus stigma terhadap korban, didukung regulasi yang tegas dan layanan perlindungan yang mudah diakses, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman serta mencegah siklus kekerasan berulang di masa mendatang.

REFERENSI

- Azizah, Q. N., & Kurnia, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 68–75. <https://doi.org/10.47200/aoassagcj.v2i2.1849>
- Campbell, R. (2016). Rape survivors' experiences with the legal and medical systems: Do rape victim advocates make a difference? *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 55(5), 451–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.04.010>
- Connell, R. W. (2005). Change among the gatekeepers: Men, masculinities, and gender equality in the global arena. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30(3), 1801–1825. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/427525>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Belajar.
- Darwis, H., & Rohmaniyah, I. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Mapili Barat Polewali Mandar. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 7(1), 30–42. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v7i1.30713>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Dumai, D. P. P. dan P. A. K. (2022). *Data Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2022*. DPPPA. <https://dirganusantara.com/news/detail/1750>
- Indrawati, R. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2).
- Jovanka Yves Modiano. (2021). PENGARUH BUDAYA PATRIARKI DAN KAITANNYA DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Sopientia et Virtus*, 6(2), 129–140.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). CA: SAGE Publications.
- Lenore E. Walker. (2014). *The Battered Woman*. Harper Collins.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods*

- Sourcebook* (UI-Press (ed.); 3rd ed.). USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). CA: SAGE Publications.
- Putri, A. D., & Kurniawati, H. (2022). Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Strategi Pemulihannya. *Jurnal Konseling Dan Psikologi*, 4(3), 233–245. <https://doi.org/https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jkp/article/view/4062>
- Putri, R. D., & Hartini, S. (2021). Sikap Masyarakat terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 33–48.
- Rahmadani, D. A., & Suartini, S. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(2), 70. <https://doi.org/10.36722/jpm.v4i2.960>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Setiawan, A., & Ramadhan, D. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan X. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 45–58.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sylvia, W. (1990). *Theorizing Patriarchy*. B. Blackwell.
- Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Alsami, F., Effendi, D. M., Sulastri, M., & Khotimah, K. (2024). Budaya Patriaki Menyebabkan Kekerasan Rumah Tangga Di Desa Betung 1. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(5), 120–128. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). CA: SAGE Publications.